

## PENGARUH KONEKSI POLITIK DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP BIAYA AUDIT

Sabda Surya Daniel Simanjuntak, Tri Jatmiko Wahyu Prabowo<sup>1</sup>

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedarto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

### ABSTRACT

*This study aims to determine the extent of the ability of political connections in influencing audit costs and to determine the extent to which corporate governance capabilities are assessed using the corporate governance perception index in influencing audit fees. This analysis is also supported by several control variables namely company size, return on assets, and the public accounting firm used. The sampling method used in this study was purposive sampling, the number of companies sampled for 9 companies with observations for 4 years so that a total of 36. Data processing used by researchers is multiple regression analysis. The results of this study indicate that political connections have a positive effect on rejected audit fees. Meanwhile corporate governance which is assessed using the corporate governance perception index has a negative effect on accepted audit fees.*

*Keywords: political connections, corporate governance, audit fees, corporate governance perception index, company size, return on assets, and public accounting firm.*

### PENDAHULUAN

Laporan keuangan berisi informasi tentang kegiatan perusahaan yang merupakan cerminan dari kondisi keuangan perusahaan, dimana informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan yaitu investor, pemerintah, masyarakat maupun kreditor. Karena hasil dari laporan keuangan sangat berguna bagi pemakai laporan keuangan untuk membuat suatu keputusan maka penyajian laporan keuangan dituntut untuk netral, kredibel dan relevan.

Untuk menjaga netralitas laporan keuangan dibutuhkan auditor independen. Auditor independen adalah auditor yang tidak memihak serta bebas dari intervensi pemakai laporan keuangan baik itu manajemen maupun *stakeholder*. Auditor independen mengaudit laporan keuangan perusahaan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dilaporkan oleh manajemen kepada *stakeholder* atau pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Salah satu yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah besaran *audit fee* yang diterima oleh auditor dalam melakukan tugasnya.

Audit fee merupakan imbalan yang diterima oleh auditor atas jasa audit yang diberikan. Besaran *audit fee* yang diberikan klien kepada auditor atas jasa audit yang diberikan belum ada yang mengatur. Peraturan IAI menyebutkan besarnya *fee* anggota dapat bervariasi tergantung pada resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan, pertimbangan profesional lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa penetapan audit fee dilakukan secara subjektif, ditentukan atas dasar tawar menawar antara auditor dan klien karena persaingan antara sesama akuntan publik.

Fitri (2019) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik memiliki tingkat transparansi yang rendah dalam laporan keuangan sehingga berakibat pada buruknya kualitas laporan keuangan dan terjadi resiko salah saji pada laporan keuangan. Semakin tinggi risikonya maka semakin tinggi juga upaya yang dilakukan auditor dalam memeriksa perusahaan

---

<sup>1</sup> Corresponding author

yang terkoneksi secara politik. sehingga *audit fee* juga mengalami kenaikan. Penelitian yang dilakukan oleh Wahab (2011) terhadap perusahaan yang memiliki koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*. Perusahaan yang mempunyai koneksi politik sering menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan akses yang lebih mudah untuk memperoleh pinjaman lunak. Penelitian Wahab (2011) yang lain menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara *corporate governance* terhadap *audit fee*.

Pelaksanaan *good corporate governance* harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sebagai pihak yang independen, komisaris independen harus bisa mencegah eksploitasi dari pemegang saham mayoritas pada pemegang saham minoritas dalam pengelolaan perusahaan (Hay et al, 2008). Untuk itu, komisaris independen cenderung untuk menggunakan jasa auditor berkualitas. Sedangkan menurut Wu (2012) semakin sempurna struktur tata kelola perusahaan suatu perusahaan, semakin sedikit risiko yang dihadapi oleh perusahaan audit dan auditor dengan demikian semakin rendah biaya audit yang akan dikenakan.

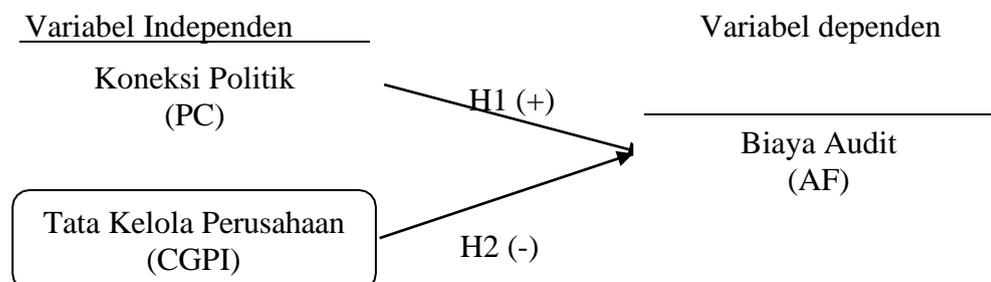
### KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Jensen dan Meckling merupakan orang yang pertama kali mengembangkan teori agensi pada tahun 1976 dalam tulisan yang berjudul "*Theory of the firm: Managerial behaviour, agency costs, and ownership structure*". Teori ini membahas hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut *nexus of contract*. *Principal* adalah orang yang memberi wewenang atau pemegang saham, dan *agent* adalah manajer.

Pihak *agent* maupun pihak *principal* dalam teori agensi ini menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak akan menyebabkan terjadinya konflik keagenan. *Agent* atau manajer akan mengambil keputusan yang memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri sebelum memberikan manfaat kepada pemegang saham atau *principal*. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan manajer yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham yang akan diwujudkan melalui pemaksimalan harga saham biasa (Weston dan Brigham, 1990).

Asumsi bahwa setiap individu atau pihak termotivasi oleh kepentingan masing-masing sesuai dengan pernyataan Eisenhardt (1989) yang menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: 1). Umumnya manusia mementingkan diri sendiri (*self interest*); 2). Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*); 3). Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut *agent* maupun *principal* sebagai manusia juga akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi.

Konflik keagenan semakin meningkat karena *principal* tidak dapat memonitor aktivitas *agent* sehari-hari untuk memastikan bahwa *agent* bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham. *Agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan karena *agent* lebih sering berhadapan dengan kegiatan operasional di dalam suatu perusahaan. Hal inilah menyebabkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh manajer dan pemegang saham (Nasution dan Doddy, 2007). Ketidakseimbangan informasi ini disebut dengan informasi asimetri.



### **Pengaruh Koneksi Politik terhadap Biaya Audit**

Perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah perusahaan yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintahan, sehingga perusahaan yang memiliki koneksi politik merupakan perusahaan yang *risk taker*. Memiliki atribut sebagai perusahaan *risk taker* karena sering menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan akses yang lebih mudah untuk memperoleh pinjaman lunak (Yoshihara, 1988). Pinjaman lunak ini digunakan perusahaan untuk mengatasi krisis yang sedang terjadi karena perusahaan yang mempunyai koneksi politik kemungkinan mengalami kegagalan yang lebih besar (Johnson dan Milton, 2003),

Selain itu, audit menjadi lebih beresiko lebih tinggi karena adanya kemungkinan lebih besar kesalahan dalam pelaporan (Johnson dan Milton, 2003). Fitri (2019) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik memiliki tingkat transparansi yang rendah dalam laporan keuangan sehingga berakibat pada buruknya kualitas laporan keuangan dan terjadi resiko salah saji pada laporan keuangan. Semakin tinggi resikonya maka semakin tinggi juga upaya yang dilakukan auditor dalam memeriksa perusahaan yang terkoneksi secara politik. Sehingga *audit fee* juga mengalami kenaikan. Asumsi bahwa semakin besar resiko yang diterima oleh auditor maka *fee* yang akan didapatkan auditor akan semakin tinggi juga.

Berdasarkan uraian tersebut menghasilkan hipotesis sebagai berikut :

**H1 : Perusahaan yang mempunyai koneksi politik membayar biaya audit yang lebih tinggi**

### **Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Biaya Audit**

Tata kelola perusahaan merupakan sistem yang mengendalikan dan mengatur perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder* (Thomas, 2006). Konsep ini menegaskan dua hal yaitu, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat waktu; hal selanjutnya yaitu kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, transparan, tepat waktu terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) berguna untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan, oleh sebab itu perusahaan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menurut Wu (2012) semakin sempurna struktur tata kelola perusahaan suatu perusahaan, semakin sedikit risiko yang dihadapi oleh perusahaan audit dan auditor dengan demikian semakin rendah biaya audit yang akan dikenakan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

**H2 : Perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik membayar biaya audit yang lebih rendah.**

## **METODE PENELITIAN**

### **Variabel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel yang terdiri dari 2 (dua) variabel independen yaitu koneksi politik dan *good corporate governance*, 1 (satu) variabel dependen yaitu *audit fee* serta variabel kontrol yang terdiri atas ukuran perusahaan, *Return on Asset*, dan KAP yang digunakan.

### **Audit Fee**

Data tentang *audit fee* diambil dari akun *professional fees* yang terdapat pada laporan keuangan.

### **Koneksi Politik**

Perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan yang mempunyai hubungan dengan pihak yang mampu menyediakan fasilitas koneksi politik. Pengukuran variabel ini menggunakan analisis variabel *dummy*, terdapat kriteria koneksi politik, seperti : perusahaan merupakan BUMN maupun BUMD, pimpinan perusahaan yaitu dewan direksi, dewan direksi komisaris atau pemegang saham mayoritas (memiliki saham >10%) adalah anggota legislatif, menteri, pemimpin partai politik. apabila perusahaan memenuhi salah satunya maka dianggap perusahaan berkoneksi politik, sehingga diberikan angka 1. Sedangkan perusahaan yang tidak memiliki salah satu dari kriteria maka dianggap perusahaan tidak berkoneksi politik sehingga diberikan angka 0.

### **Good Corporate Governance**

*Good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu sistem perusahaan yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengatur perusahaan guna menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder*. Variabel ini diukur menggunakan *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dikeluarkan oleh IICG (*Indonesian Institute for Corporate Governance*) yang dipublikasikan melalui majalah SWA. Variabel ini menggunakan skala rating yaitu memberikan skor berupa angka mulai 0-100. Peringkat sudah diberikan oleh IICG berupa peringkat perusahaan yang sangat terpercaya, terpercaya, dan cukup terpercaya.

### **Ukuran Perusahaan**

Perusahaan besar dapat memiliki masalah keagenan yang lebih besar yang berdampak pada kondisi *corporate governance* yang lebih baik. Penelitian ini memasukkan variabel ukuran perusahaan atau *firm size* sebagai variabel kontrol. Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan log natural dari *total asset* (Kalpper dan Love, 2002). Ukuran perusahaan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Ukuran perusahaan (*Firm Size*) = Ln of *Total Assets*

### **Return on Asset**

Nilai ROA perusahaan yang rendah akan membutuhkan usaha audit yang besar dan kewajiban auditor lebih mendapatkan perhatian. Wahab (2011) menambahkan ROA sebagai proxy solvabilitas yang diharapkan mempunyai hunungan negatif. Variabel ini dilambangkan dengan ROA, dan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{pendapatan operasional setelah pajak}}{\text{total aset}}$$

### **Kantor Akuntan Publik**

Pemakaian kantor akuntan publik yang terpercaya dapat mempengaruhi pemberian *audit fee*. Kantor akuntan publik mempunyai kredibilitas tergabung dalam *The Big 4*. Kantor akuntan yang termasuk dalam *The Big 4* adalah : KAP Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja yang berafiliasi dengan Ernst and Young (E & Y); KAP Haryanto Sahari & Co. yang berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers (PwC); KAP Osman Bing Satrio & Co. yang berafiliasi dengan Deloitte Touche Thomatsu (DTT); KAP Siddharta, Siddharta, dan Widjaja yang berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG).

Pengukuran variabel ini menggunakan skala nominal, angka 1 untuk mengindisikan penggunaan KAP *The Big 4* di perusahaan dan angka 0 untuk mengindisikan perusahaan tidak menggunakan KAP *The Big 4*.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Objek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan yang mengikuti survey *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dilaksanakan *Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG) tahun 2015-2018. Pemilihan populasi dilakukan karena penelitian ini ingin memberikan informasi perbandingan data antar beberapa sektor yang telah disurvei oleh *corporate governance perception index*.

Sampel penelitian dipilih melalui metode *sampling purposive* yaitu dengan menetapkan beberapa kriteria, seperti: pertama, perusahaan yang termasuk dalam penilaian survey *corporate governance perception index* yang dilaksanakan IICG tahun 2015-2018. Kedua, Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. Ketiga, menyediakan informasi *Annual Report* 2015-2018 yang ada di *website* BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) serta *website* resmi masing-masing perusahaan. Keempat, perusahaan yang menyediakan data sehubungan dengan variabel terkait penelitian yang lengkap. Kelima, perusahaan mencantumkan *professional fees* pada laporan keuangan perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah atau telah dikonversi ke mata uang rupiah. Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria tidak dapat dijadikan sebagai sampel penelitian.

Berdasarkan hasil akhir dari teknik *purposive sampling* dengan lima kriteria yang telah dipaparkan, maka diperoleh sebanyak 36 sampel perusahaan dari total 137 total populasi dengan rincian tercantum pada tabel 1 sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Sampel Penelitian**

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan yang mengikuti penilaian CGPI yang dilakukan oleh IICG 2015-2018	137
2.	Perusahaan yang tidak terdaftar di BEI 2016-2018	(82)
3.	Perusahaan yang tidak konsisten mengikuti CGPI yang dilakukan oleh IICG 2015-2018	(19)
4.	Jumlah Sampel Penelitian	36

(Sumber: Data sekunder yang diolah 2020)

Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini meliputi seluruh klarifikasi industri. Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa terdapat 137 perusahaan yang mengikuti penilaian *corporate governance perception index* yang dilaksanakan oleh *indonesian institute of corporate governance* periode 2015-2018. Sebanyak 82 perusahaan dieliminasi karena tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018. Selanjutnya terdapat 19 perusahaan yang tidak konsisten mengikuti penilaian *corporate governance perception index* yang dilaksanakan oleh *indonesian institute of corporate governance* periode 2015-2018. Sebanyak 36 sampel data perusahaan yang dapat dijadikan sebagai sampel akhir pada penelitian ini.

**Pembahasan Hasil Penelitian**

Uji t dilakukan untuk menjelaskan gambaran besarnya dampak setiap independen variabel melalui satuan mampu menerangkan dependen variabel yang digunakan. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2**  
**Uji Statistik t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	15,542	1,885		8,244	,000
CGPI (X1)	-,066	,027	-,249	-2,446	,021
Politik (X2)	,120	,130	,074	,920	,365
LN SIZE (X3)	,404	,043	1,098	9,397	,000
ROA (X4)	-1,399	1,119	-,109	-1,250	,221
KAP (X5)	-,961	,196	-,447	-4,898	,000

(Sumber: Data sekunder yang diolah 2020)

Tingkat signifikansi yang digunakan pada penelitian ini adalah sebesar 5%. Variabel independen dapat dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen apabila memiliki nilai signifikansi di bawah 5% atau 0,05.

Hasil analisis regresi berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan variabel independen yaitu *good corporate governance* (CGPI) memiliki besaran koefisien regresi sebesar -0,249 yang bertanda negatif. Besaran ini berarti pengaruh yang diberikan negatif dimana apabila *good corporate governance* meningkat maka akan menurunkan biaya audit sebesar 0,249 atau (24,9%) dari biaya audit sebelumnya. Variabel independen koneksi politik memiliki besaran koefisien regresi sebesar 0,074 yang bertanda positif. Besaran ini berarti pengaruh yang diberikan positif dimana apabila semakin ada koneksi politik maka akan meningkatkan besaran biaya audit yang dibebankan sebesar 0,074 atau (7,4%) dari biaya audit sebelumnya. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan (SIZE) memiliki besaran koefisien regresi sebesar 1,098 yang bertanda positif. Besaran ini berarti pengaruh yang diberikan positif dimana apabila ukuran perusahaan semakin besar maka akan meningkatkan besaran biaya audit yang dibebankan sebesar 1,097 dari biaya audit sebelumnya. Variabel kontrol selanjutnya yaitu *return on asset* (ROA) memiliki besaran koefisien regresi sebesar -0,109 yang bertanda negatif. Besaran ini berarti pengaruh yang diberikan negatif dimana apabila *return on asset* semakin besar maka akan menurunkan biaya audit sebesar 0,109 atau (10,9%) dari biaya audit sebelumnya. Variabel kontrol yang terakhir adalah kantor akuntan publik yang digunakan (KAP) memiliki besaran koefisien regresi sebesar -0,447 yang bertanda negatif. Besaran ini berarti pengaruh yang diberikan negatif dimana apabila KAP yang digunakan semakin besar maka akan meningkatkan biaya audit sebesar 0,447 atau 44,7% dari biaya audit sebelumnya.

Hasil analisis uji-t menunjukkan pengaruh variabel *good corporate governance* terhadap biaya audit memiliki signifikansi 0,021, karena nilai sig. yang didapat < tignkat sig. = 0,05, maka disimpulkan hipotesis *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap biaya audit diterima. Pengaruh koneksi politik terhadap biaya audit memiliki signifikansi sebesar 0,365, karena nilai signifikansi > tingkat signifikansi = 0,05, maka disimpulkan hipotesis koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap biaya audit ditolak.

Variabel kontrol ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan nilai sig. sebesar 0,000. Variabel kontrol *return on asset* (ROA) menunjukkan nilai sig. sebesar 0,221. Variabel kontrol kantor akuntan publik yang digunakan (KAP) menunjukkan nilai sig. sebesar 0,000. Variabel kontrol yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen biaya audit (AF) adalah variabel kontrol *return on asset* (ROA), hal ini dikarenakan tingkat signifikansi ROA berada diatas tingkat signifikansi yaitu 5%. Sedangkan variabel kontrol lainnya yaitu ukuran perusahaan (SIZE) dan kantor akuntan publik yang digunakan (KAP) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen biaya audit (AF). Hal ini dikarenakan tingkat signifikansi KAP dan SIZE berada dibawah tingkat signifikansi yaitu 5%.

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh koneksi politik dan tata kelola perusahaan terhadap biaya audit. Penelitian ini menggunakan sampel 36 perusahaan yang mengikuti survey *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang dilaksanakan *Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG) tahun 2015-2018 dan sesuai dengan kriteria sampel yang telah ditetapkan peneliti. Keseluruhan sampel tersebut telah diuji menggunakan uji analisis regresi berganda.

Berdasarkan hasil uji analisis yang telah dilakukan, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik memiliki pengaruh positif terhadap biaya audit ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi politik tidak membayar biaya audit yang lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan yang tidak terkoneksi politik.

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh negatif terhadap biaya audit diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan tata kelola perusahaan yang baik akan mempengaruhi biaya jasa auditor dengan kata lain jika *good corporate governance* semakin baik maka biaya audit akan semakin berkurang. Karena jika semakin

sempurna struktur tata kelola perusahaan suatu perusahaan, semakin sedikit risiko yang dihadapi oleh auditor dengan demikian semakin rendah biaya audit yang akan dikenakan.

Batasan-batasan yang dihadapi oleh penulis dalam penelitian ini adalah tingkat kompleksitas dalam memaknai koneksi politik yang cenderung rumit, dan terbatasnya ketersediaan informasi melalui berbagai media yang ada, karena penelitian menggunakan data sekunder.

## REFERENSI

- Aldridge dan sutojo, "Good Corporate Governance: Sudut Pandang Pengusaha," dalam "Good Corporate Governance: Tujuan dan manfaat Good Corporate Governance di Indonesia", diedit oleh Hindarmojo Hinuri (Jakarta: Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia, 2005).
- Carboni, Marika. 2017. *The Financial Impact of Political Connections: Industri-Level Regulation and the Revolving Door*. Switzerland: Palgrave Macmillan
- Carretta, A., V. Farina, A. Gon and A. Parisi. 2012. Politicians "on Board": Do Political Connections Affect Banking Activities in Italy?. *European Management Review*, 9(2): 75-83
- Daniri, "Manfaat Good Corporate Governance" (Jakarta: Erlangga, 2006)
- Evlin Adelina Sinaga, Sistya Rachmawati. 2017. Besaran Fee Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jakarta: Jurnal Online Universitas Trisakti
- Effiezal Aswadi Abdul Wahab Mazlina Mat Zain Kieran James, (2011), "Political connections, corporate governance and audit fees in Malaysia", *Managerial Auditing Journal*, Vol. 26: 393 – 418
- Fisman, R.(2001). *Estimating the value of political connections*. *The American economic review*, 91(4): 1095-1102
- Fitri Nurjanah, Erina Sudaryati. 2019. Pengaruh Hubungan Politik dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Biaya Audit. Surabaya: Universitas Airlangga
- Faccio, M. 2006. Politically Connected Firms. *American Economic Review*, 96(1): 369-386
- Gomez, E.T., Jomo K.S., 1997. Malaysia's Political Economy: Politics, Patronage and Profits, First Edition. Cambridge University Press, Cambridge.
- Ghozali, Imam. 2013. *Desain Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Semarang: Yoga Pratama
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghosh, S. 2011 Firm ownership type, earnings management and auditor relationships: evidence from India. *Managerial Auditing Journal*, 26 (4): 350-369.
- Institut Akuntan Publik Indonesia, 2008. *Surat Keputusan tentang Kebijakan Penetapan Fee audit, No : KEP.24/IAP/VI/2008*
- Johnson, S., and Mitton, T. 2003. Cronyism and Capital Controls: Evidence from Malaysia. *Journal of Financial Economics*, 67(2): 351–382
- Jensen, M. C. 2001. Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function. *Journal of Applied Corporate Finance*, 14(3), 8–21
- Jensen, M. C., 2010. Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function. *Journal of Applied Corporate Finance*, 22(1): 32–42
- Jensen, M dan Meckling, W. 1976. Theory of The Firm: Manajerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4):305-360.
- Jensen, M dan Meckling, W. 1976. Theory of The Firm: Manajerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3 (4):305-360.
- Leuz, C., and F. Oberholzer-Gee. 2006. Political Relationships, Global Financing, and Corporate Transparency: Evidence from Indonesia. *Journal of Financial Economics*, 81 (2): 411-439.

- Laporan Hasil Riset dan Peningkatan Corporate Governance Perception Index 2015, di download dari [iicg.org](http://iicg.org)
- Laporan Hasil Riset dan Peningkatan Corporate Governance Perception Index 2016, di download dari [iicg.org](http://iicg.org)
- Laporan Hasil Riset dan Peningkatan Corporate Governance Perception Index 2017, di download dari [iicg.org](http://iicg.org)
- Laporan Hasil Riset dan Peningkatan Corporate Governance Perception Index 2018, di download dari [iicg.org](http://iicg.org)
- Mitton, T., 2002. A cross-firm analysis of the impact of corporate governance on the East Asian financial crisis. *Journal of Financial Economics* 64, 215–241.
- Raymond, Immanuel. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan *Audit Fees*. Semarang: Eprints Universitas Diponegoro
- Sherliza Puat Nelson, Nurul Farha Mohamed-Rusdi. 2015. Ownership structures influence on audit fee. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 5 (4): 457-478
- Suharli, Michell dan Nurlela. 2008. Konsentrasi Auditor dan Penetapan *Fee audit*: Investigasi Pada BUMN. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 12 (2): 133-148.
- Zhang, H., Li, W., Jian, M. 2012. How Does State Ownership Affect Tax Avoidance? Evidence from China. *Working paper*. School of Accountancy, Singapore Management University.  
(<https://finance.detik.com>)  
(<https://money.kompas.com>)  
(<https://finance.yahoo.com>)  
(<https://idx.co.id>)